

PENGARUH PENGGUNAAN ADD, AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Ayu Nela Sari

Nelasari022005@gmail.com

Wahidahwati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aims to examine the influence of the use of Village Fund Allocation, accountability and transparency of village financial management to the welfare of the community. This research also examined the influence of collectively the use of Village Fund Allocation, accountability and transparency of village financial management to the welfare of the community. This research is a quantitative research with rural community as research population. The sample in this research is obtained by using purposive sampling method based on the predetermined criteria of 152 people with educational background of different types of work. This research with using SPSS tool for multiple regression analysis in the method of analysis. The results showed that the use of Village Fund Allocation has a significant positive influence on community welfare and accountability of village financial management has a significant positive influence on the welfare of the community. While the transparency of village financial management shows a significant negative influence on the welfare of the community. The results of further research indicates that the use of Village Fund Allocation, accountability and transparency of village financial management influenced together to the welfare of the community.

Keywords: Village Fund Allocation, accountability, transparency, community welfare

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penggunaan Alokasi Dana Desa, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini juga menguji pengaruh secara bersama-sama penggunaan Alokasi Dana Desa, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan masyarakat desa sebagai populasi penelitian. Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode *purposive sampling* berdasarkan kriteria yang telah ditentukan 152 orang dengan latar pendidikan dan berbagai jenis pekerjaan yang berbeda. Penelitian ini menggunakan alat bantu SPSS untuk analisis regresi berganda dalam metode analisisnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa berpengaruh positif secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Sedangkan transparansi pengelolaan keuangan desa menunjukkan pengaruh negatif secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa berpengaruh secara bersama-sama terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: Alokasi Dana Desa, akuntabilitas, transparansi, kesejahteraan masyarakat

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya kabupaten/kota dilaksanakan atas asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini pemerintah pusat melalui pemerintahan desa semakin memperhatikan kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan dan pengembangan potensi desa serta peran aktif masyarakat desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri sehingga pemerintah desa bersamaarganya mampu memiliki hubungan yang sangat baik antara dua pihak tersebut.

Menurut UU Nomor 6 tahun 2014 desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atas perhatian ini pemerintah memberikan wewenang pada pemerintahan desa untuk lebih mandiri dalam meningkatkan kinerja pemerintahan desa beserta masyarakatnya untuk mengembangkan potensi desa dan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Disamping itu pemerintah telah membuat kebijakan untuk perwujudan desentralisasi keuangan desa yang mandiri dengan pembentukan Alokasi Dana Desa.

Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 menerangkan bahwa Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Besarnya Alokasi Dana Desa diperoleh dari dana perimbangan dikurangi dengan belanja pegawai dan minimal 10% digunakan untuk desa.

Akuntabilitas adalah suatu bentuk tanggungjawab pemerintahan terhadap masyarakat atas kinerja pemerintah melaksanakan tugasnya sesuai dengan wewenangnya dalam menggunakan sumber dana yang ada ataupun yang telah diterima. Sedangkan transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi mengenai hal-hal yang perlu disampaikan dalam melaksanakan tugasnya atau kegiatannya, sehingga hak masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai kinerja pemerintahan atas penggunaan sumber daya terpenuhi. Pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, semuanya harus dilaksanakan dengan berdasarkan asas akuntabel, transparan, partisipatif serta dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran (Permendagri 113 Tahun, 2014).

Dalam penelitian yang dilakukan Dura (2016) menyatakan bahwa Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD), kebijakan desa dan kelembagaan desa berpengaruh positif terhadap variabel kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang tepat guna akan memberikan dampak yang baik bagi kesejahteraan masyarakat, karna mampu membantu membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Umami *et al.* (2017) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan keuangan desa. Hal ini sangat penting bahwa penggunaan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa sangat dibutuhkan, sehingga komunikasi pemerintah desa kepada masyarakatnya akan semakin erat dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa meningkat.

Adanya program pembangunan Kampung Majapahit diharapkan bahwa pemerintahan Desa Bejjong mampu mengimbangi pemenuhan kebutuhan masyarakat baik dari pelayanan masyarakat maupun dalam kegiatan kemasyarakatan lainnya. Akuntabilitas dan transparansi pemerintahan desa harus dipenuhi dalam pengelolaan keuangan desa sehingga tidak hanya berpusat pada pembangunan fisik untuk pelaksanaan kegiatan program Kampung Majapahit

namun dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana atas kegiatan yang telah dilaksanakan.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Stewardship (*Stewardship Theory*)

Teori stewardship merupakan penggambaran situasi dimana manajer lebih berfokus pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi dan tidak termotivasi oleh tujuan individu. Teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya sebab *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya (Sugista, 2017).

Teori *Stewardship* dalam penelitian digambarkan dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada principalnya. Dalam sistem pemerintahan, pemerintah selaku *steward* bertugas untuk bergerak sesuai dengan keinginan principal mereka yaitu masyarakat. Pemerintah melakukan segala perencanaan kegiatan dan pengoperasian kegiatan mereka untuk tujuan masyarakat. Tujuan masyarakat disini adalah kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan para *steward* guna kepentingan sasaran organisasi pemerintahan. Pemerintah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada principal dalam pelaksanaan tugasnya.

Alokasi Dana Desa (ADD)

Pengelolaan keuangan ADD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pasal 18 Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen). Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Penggunaan Alokasi Dana Desa sebesar 30% adalah untuk biaya operasional pemerintah desa, sedangkan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar 70% digunakan untuk penggunaan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan di bidang pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan bantuan keuangan kepada lembaga masyarakat desa.

Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2009) Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban atas penggambaran atas kinerja suatu organisasi atau pimpinan kepada pihak yang membutuhkannya dengan bentuk laporan yang mampu dipertanggungjawabkan atas pengelolaan suatu sumber pendanaan atau keuangan dengan menggunakan prinsip perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan.

Dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah dituntut untuk melaksanakan pengelolaan keuangan yang bersifat akuntabel. Akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam kegiatannya adalah mampu menyediakan laporan keuangan yang mampu dipertanggungjawabkan kebenarannya, lapoaran yang telah disajikan merupakan gambaran dari kegiatan operasional pemerintahan maupun kegiatan pemerintah dalam melakukan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta pertanggungjawaban.

Transparansi

Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi kepada masyarakat juga untuk memberikan kepercayaan lebih kepada pemerintahan atas kinerja pemerintahan dalam mengelola keuangan desa. Masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui informasi pengelolaan keuangan desa oleh pemerintahan desa, hal tersebut juga merupakan sebagai bentuk pengawasan masyarakat atas kerja pemerintah desa.

Kesejahteraan Masyarakat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Atas dasar itu pemerintah telah memberikan kebijakan dengan memberikan Alokasi Dana Desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Pemberian bantuan dari pemerintah pusat untuk pembangunan desa berupa Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan mampu membiayai pembangunan desa agar mencapai kesejahteraan yang diinginkan masyarakat desa. Pemerintah Pusat juga mengharapkan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerja pemerintah desanya serta keterbukaan informasi untuk masyarakatnya.

Adapun penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bempah (2013) dalam penelitiannya yang berjudul *Analisis Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Penduduk Miskin di Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso* menemukan bahwa sebagian warga miskin menyetujui adanya Alokasi Dana Desa mampu meningkatkan pendapatan karena mampu membantu warga yang tergolong miskin. Alokasi Dana Desa juga membantu meningkatkan kemajuan perekonomian pada wilayah daerah yang tergolong miskin dengan bantuan Alokasi Dana Desa. Sedangkan penelitian dari Sugista (2017) yang berjudul *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan Desa* menjelaskan bahwa transparansi berpengaruh positif dalam meningkatkan pembangunan desa dan akuntabilitas juga berpengaruh positif meningkatkan pembangunan desa. Sedangkan untuk partisipasi mampu meningkatkan pembangunan desa.

Anwar dan Jatmiko (2014) dalam penelitiannya *Kontribusi Dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Yang Transparan Dan Akuntabel (Survey Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Ngaglik, Sleman, Yogyakarta)* menyatakan bahwa menjelaskan bahwa pemerintahan desa telah memperhatikan kesejahteraan desa serta dalam memperlakukan keseluruhan masyarakat dilakukan secara adil dan bijak, pemerintahan juga desa telah melakukan kegiatan pembangunan desa secara efisien dan efektif serta tetap memanfaatkan keuangan secara tepat. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti memiliki hipotesis sebagai berikut:

H1: Penggunaan Alokasi Dana Desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

H2: Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

H3: Transparansi pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Obyek Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian jenis penelitian kuantitatif, berdasarkan karakteristik masalahnya penelitian ini menggunakan metode Penelitian Kasual Komparatif (*Casual-Comparative Research*). Metode ini yang digunakan untuk mengetahui atau menguji hubungan sebab akibat yang terjadi antara dua variabel atau lebih. Variabel independen atau variabel yang mempengaruhinya adalah Penggunaan Alokasi Dana Desa (PADD), Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (APKD) dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa (TPKD) terhadap variabel dependennya atau variabel yang dipengaruhi adalah Kesejahteraan Masyarakat. Obyek Penelitian ini adalah Desa Bejjong. Desa Bejjong adalah sebuah Desa di wilayah Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur.

Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini tehnik pengambilan sampel yang digunakan adalah pemilihan sampel bertujuan atau *Purposive Sampling*. Metode pemilihan sampel bertujuan yaitu tipe pemilihan sampel secara tidak acak, informasi yang diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu (umumnya disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian). Peneliti telah menetapkan kriteria yang harus dipenuhi sampel dari penelitian ini, sebagai berikut: (1) Penduduk yang bertempat tinggal di Desa Bejjong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto. (2) Pendidikan terakhir minimal SMA. (3) Memiliki profesi atau pekerjaan tetap yang terdiri dari PNS, pedangan, karyawan, wirausaha, dokter, TNI, Polisi, pengrajin dll.

Teknik Pengumpulan Data

Data Primer

Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan pembagian kuisisioner kepada responden, beberapa butir pertanyaan yang diajukan secara personal yang telah dipilih oleh peneliti yaitu masyarakat Desa Bejjong Kecamatan Trowulan.

Data Sekunder

Data Sekunder dapat berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang telah dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan. Sedangkan data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini didapatkan berupa dokumentasi. Data sekunder dari penelitian ini berupa dokumen laporan keuangan tahunan yaitu APBDesa, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan pertanggungjawaban APBDesa.

Variabel dan Definisi Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 variabel yakni variabel independen atau variabel bebas dan variabel dependent atau variabel terikat. Dalam penelitian ini variabel independen terdiri dari Penggunaan Alokasi Dana Desa (PADD) dengan 5 butir pertanyaan, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (APKD) dengan 3 butir pertanyaan dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa (TPKD) dengan 4 butir pertanyaan, sedangkan

variabel dependen atau variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kesejahteraan Masyarakat (KS) dengan 7 butir pertanyaan.

Penelitian ini menggunakan kuisioner untuk memperoleh data primernya, maka dari itu dalam penelitian ini telah ditentukan indikator untuk mengukur masing-masing variabel sebagai berikut:

Tabel 1

No.	Variabel	Indikator
1	Penggunaan Alokasi Dana Desa (PADD)	a. Ketepatan penggunaan dana. b. Tercapainya tujuan kegiatan.
2	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (APKD)	a. Perencanaan. b. Pelaksanaan dan pengawasan. c. Pertanggungjawaban.
3	Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa (TPKD)	a. Hak masyarakat memperoleh informasi. b. Keterbukaan informasi.
4	Kesejahteraan Masyarakat (KS)	a. Pendidikan. b. Kesehatan. c. Perekonomian.

Sumber: Sugista (2017) dan Dura (2016)

Dalam penelitian ini, variabel independen dan variabel dependen masing-masing diukur menggunakan sajian pertanyaan atau kuisioner untuk mengetahui hasilnya digunakan skala likert dengan poin mencapai nilai 5 dalam setiap pertanyaannya. Uji asumsi klasik juga digunakan dalam penelitian ini diantaranya uji normalitas, uji heteroskedastisitas dan uji multikorelitas untuk mengetahui apakah ada gangguan dalam model regresi berganda yang akan digunakan. Sedangkan untuk mengetahui pengaruh sebab akibat dari variabel independen terhadap variabel dependen peneliti menggunakan teknik analisis regresi berganda.

Uji Hipotesis

Uji T dipakai untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lain bersifat konstan. Uji ini dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel. Dalam penelitian digunakan signifikansi 5% untuk nilai t. Adapun pengujian hipotesisnya adalah jika $p\text{ value} < 0.05$ maka H_1 diterima dan jika $p\text{ value} > 0,05$ maka H_1 ditolak. Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi sebagai berikut:

$$KS = a + \beta_1 PADD + \beta_2 APKD + \beta_3 TPKD + e$$

Keterangan :

KS	= Kesejahteraan Masyarakat.
a	= Konstanta.
β 1, 2, 3	= Koefisien regresi dari variabel independen.
PADD	= Penggunaan Alokasi Dana Desa.
APKD	= Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.
TPKD	= Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa.
e	= Error term.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Desa Bejijong adalah satu desa yang paling barat dan desa yang paling dekat dengan kantor Kecamatan Trowulan, desa ini letaknya berbatasan dengan Kecamatan wilayah Kabupaten Jombang, dengan batas-batas :

1. Perbatasan sebelah timur : Desa Trowulan.
2. Perbatasan sebelah barat : Kecamatan Mojoagung.
3. Perbatasan sebelah selatan : Desa Trowulan.
4. Perbatasan sebelah utara : Desa Kejagan.

Desa Bejijong secara administratif terletak di wilayah Kecamatan Trowulan dengan jarak ± 13 Km dari Ibu Kota Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan data Profil Desa Bejijong 2016 yang diperoleh dalam penelitian, Desa Bejijong memiliki jumlah penduduk keseluruhan sebesar 3.916 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar 1935 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 1981 jiwa. Sebanyak 1.240 Kepala Keluarga (KK) yang terdaftar hingga akhir tahun 2016.

Tingkat pendidikan pada tamatan SD sederajat di Desa Bejijong sangat tinggi sebanyak 1206 orang. Jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan minimal SMA adalah sebanyak 755 orang, sedangkan dibawah tingkat SMA adalah sebesar 2215 orang. Mata pencaharian sebagai pengrajin memiliki angka tertinggi dengan sebanyak 412 orang yang memiliki mata pencaharian pengrajin, hal ini benenarkan bahwa Desa Bejijong merupakan desa sentra pengrajin cor kuningan, patung, batik dan aksesoris lainnya. Dari jumlah penduduk Desa Bejijong secara keseluruhan sebanyak 3.916 jiwa, sedangkan yang terdaftar memiliki penghasilan adalah sebesar 1.173 jiwa. Berdasarkan data sebelumnya untuk jumlah penduduk dengan usia 16-50 atau penduduk pada usia produktif sebesar 1.729 yang belum bekerja atau tidak bekerja adalah 556 orang. Menurut data yang diperoleh, penduduk Desa Bejijong merupakan mayoritas pemeluk agama Islam, jumlah penduduk yang tercatat beragama Islam adalah sebanyak 3.849 orang, penduduk dengan agama Kristen adalah sebanyak 17 orang, sedangkan untuk agama Budha adalah sebanyak 8 orang. Hal ini membuktikan bahwa meskipun Desa Bejijong dengan wilayah pariwisata penganut agama Budha namun mayoritasnya tetap memeluk agama Islam. Etnis yang terdapat di wilayah Desa Bejijong tercatat sebanyak 3.861 orang merupakan etnis Jawa, 10 oarang beretnis Cina sedangkan untuk etnis lainnya atau Bugis sebanyak 3 orang.

Alokasi Dana Desa di Desa Bejijong

Pemberian ADD digunakan untuk biaya operasional Pemerintahan Desa dan untuk Pmeberdayaan Masyarakat. Besarnya biaya untuk kegiatan operasional Pmerintahan Desa adalah sebesar 30% setelah dikurangi Penghasilan Tetap (Siltap) Kepala Desa dan Pemerintahan Desa, sedangkan untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat adalah sebesar 70% setelah dikurangi Penghasilan Tetap (Siltap) Kepada Desa dan Pmerintahan Desa. Pembagian prorestase tersebut termuat dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dibagi dalam 2 (dua) tahap meliputi (1) Tahap I adalah 50% dari nilai ADD keseluruhan tahun berjalan dan (2) Tahap II adalah 50% dari nilai ADD kelurahan tahun berjalan apabila mampu melunasi pagu PBB. Adapun penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Bejijong sebagai berikut:

Tabel 2
Analisis Laporan Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 Desa Bejjong Kecamatan Trowulan (Dalam Rp.).

No.	URAIAN	Anggaran (Rp.)	Prosentase (%)
1	Biaya perjalanan Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa (PD)	2,400,000	1.74
2	Bayar rapat-rapat	1,200,000	0.87
3	Bayar langganan majalah	1,200,000	0.87
4	Bayar rekening listrik kantor desa dan bangunan milik desa	1,200,000	0.87
5	Bayar pembelian kursi rapat	975,000	0.71
6	Bayar pembelian bendera dan tiang bendera dan lapangan pingpong	3,422,500	2.48
7	Bayar pembelian buku administrasi desa	1,672,500	1.21
8	Bayar honorketua dan anggota BPD	12,000,000	8.70
9	Bayar honor ketua RT dan ketua RW	4,500,000	3.26
10	Bayar pemebelian komputer dan printer	7,247,500	5.26
11	Bayar pembelian seragam untuk perangkat desa	6,171,525	4.48
12	Bayar pembelian lampu dan alat listrik	689,875	0.50
13	Bayar pembelian stempel dan banner	450,000	0.33
14	Bayar majalah bulanan	100,000	0.07
15	Bayar pembelian meteran	450,000	0.33
16	Bayar pembelian umbul-umbul	550,000	0.40
17	Rehab berat gedung POSKEDES desa	83,671,900	60.68
18	Biaya pemberdayaan/ insentif LPM	10,000,000	7.25
	Jumlah Total ADD	137,900,800	100

Sumber: Data sekunder diolah, 2018

Dilihat dari tabel 1, penggunaan Alokasi Dana Desa terbesar adalah untuk kegiatan Rehab Berat Gedung POSKEDES sebesar Rp. 83.671.900 merupakan 60.68% dari total ADD untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang diterima oleh Desa Bejjong. Sebesar 60,68% dari 70% biaya digunakan untuk perbaikan POSKEDES dalam tahun 2016, hal tersebut membuktikan bahwa pada tahun 2016 penggunaan ADD untuk pemberdayaan masyarakat yang terbesar digunakan untuk perbaikan infrastruktur pada bidang kesehatan. Dimaksudkan dalam perbaikan infrastruktur POSKEDES ini akan mampu memberikan pelayanan yang memadai sehingga kesehatan di Desa Bejjong semakin meningkat.

Sisa dari penggunaan ADD untuk pemberdayaan masyarakat lainnya adalah digunakan untuk biaya pemberdayaan/intesif LPM sebesar Rp.10.000.000, jumlah tersebut merupakan 7.25% dari total ADD yang diterima untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, meskipun sebagian besar penggunaan ADD dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat digunakan untuk

perbaikan POSKEDES namun masih dialokasikan untuk kegiatan pemberdayaan LPM, hal ini membuktikan bahwa pemberdayaan insetif masyarakat merupakan hal yang sangat penting.

Uji Kualitas Data

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidak suatu kuisisioner. Ghazali (2016) menyatakan bahwa jawaban responden dikatakan reliabel terhadap pertanyaan jika jawaban dari pertanyaan konsisten atau jawaban tidak acak untuk pengukuran hal yang sama pada setiap variabel dalam pertanyaan.

Tabel 3
Hasil Uji Validitas

		Hasil
PADD	Pearson Correlation	.377**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	152
APKD	Pearson Correlation	.578**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	152
TPKD	Pearson Correlation	.329**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	152
KS	Pearson Correlation	.532**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	152
Skor_total	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)	
	N	152

Sumber: Data sekunder diolah, 2018

Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa pada seluruh pertanyaan dalam kuisisioner untuk masing-masing variabel dinyatakan valid atau sah karena mempunyai nilai sig. > 0,005. Sedangkan untuk hasil yang sama ditunjukkan pada uji reabilitas yang menjelaskan bahwa seluruh jawaban dari pertanyaan kuisisioner dianggap konsisten dan tidak acak.

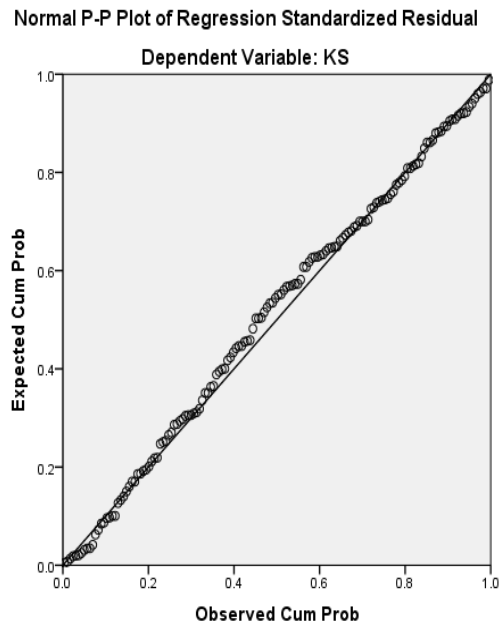
Tabel 4
Hasil Uji Reabilitas

Varaibel	Cronbach's Alpha	N of Items	Putusan
PADD	0,352	5	Reliabel atau konsisten
APKD	0,261	3	Reliabel atau konsisten
TPKD	0,438	4	Reliabel atau konsisten
KS	0,181	7	Reliabel atau konsisten

Sumber: Data sekunder diolah, 2018

Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan uji normalitas menggunakan uji Kolmogrov-Smirnov menjelaskan bahwa distribusi data dinyatakan normal meskipun memiliki nilai yang sangat rendah pada *Asymp. Sig. (2-tailed)* yaitu sebesar 0,200. Dalam hal ini menjelaskan bahwa *Asymp. Sig (0,200) > alpha (0,05)* sehingga dinyatakan telah memenuhi asumsi normalitas. Sedangkan untuk uji Normal P-P Plot dapat dilihat pada gambar 1.



Sumber: Data sekunder diolah, 2018

Gambar 1

Uji Normalitas P-Plot

Berdasarkan gambar 1 dapat dilihat bahwa titik-titik mengikuti garis diagonal dan menyebar disekitar garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dinyatakan memenuhi asumsi normalitas. Dalam penelitian ini, multikolonieritas akan dilihat dari VIF (*Variance Inflation Factor*). Jika nilai tolerance rendah maka sama dengan nilai VIF tinggi, dengan nilai tolerance ≥ 0.10 atau samadengan nilai VIF ≤ 10 untuk menunjukkan multikolonieritasnya. Diperoleh bahwa variabel PADD sebesar 1,043, variabel APKD sebesar 1,028 dan variabel TPKD sebesar 1,024 dengan ini disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinieritas pada variabel terikat KS terhadap variabel bebas PADD, APKD, dan TPKD karena nilai VIF ≤ 10 .

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians residual dari satu pengamatan dengan pengamatan lainnya (Ghozali, 2011:139). Uji asumsi heteroskedasitas diketahui bahwa titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak ditemukan masalah heteroskedasitas dan memenuhi asumsi klasik untuk uji heteroskedasitas.

Uji F (*Good of fit*)

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel. Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap varibel terikat. Jika Fhitung < Ftabel, maka H_0 diterima atau variabel bebas tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat dan jika Fhitung > Ftabel, maka H_1 diterima. Probability sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) digunakan untuk mengetahui signifikan atau tidak pengaruh secara bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun ketentuannya adalah jika sig > α (0,05), maka H_0 diterima H_1 ditolak dan jika sig < α (0,05), maka H_0 ditolak H_1 diterima.

Tabel 5
Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	130.490	3	43.497	19.544	.000 ^b
	Residual	329.378	148	2.226		
	Total	459.868	151			

Sumber: Data sekunder diolah, 2018

Hasil pengujian menunjukkan bahwa model regresi dapat dikatakan telah layak untuk penelitian karena dalam hasil yang ditunjukkan memiliki nilai signifikansi $\leq 0,05$ (5%). Disamping itu, hasil ini juga menjelaskan bahwa adanya pengaruh secara bersama-sama antara variabel dependen terhadap variabel independen dalam penelitian ini.

Uji Hipotesis

Tabel 6
Hasil Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	22.581	2.142		10.541	.000
	PADD	.224	.078	.203	2.855	.005
	APKD	.476	.082	.412	5.841	.000
	TPKD	-.141	.061	-.164	-2.327	.021

Sumber: Data sekunder diolah, 2018

Hasil pengujian hipotesis penelitian berdasarkan uji pada tabel 6 dapat dijelaskan secara runtut sebagai berikut:

Hasil pengujian untuk pengaruh Penggunaan Alokasi Dana Desa (PADD) terhadap variabel Kesejahteraan Masyarakat (KS) menghasilkan nilai koefisien (*standardized coefficient*) positif sebesar 0,224 dan *sig. value* sebesar $(0,005) < sig. tolerance$ (0,05), maka H1 diterima. Artinya, pengaruh penggunaan Alokasi Dana Desa terhadap kesejahteraan terbukti signifikan. Dengan demikian H1 yang diajukan yaitu "Penggunaan Alokasi Dana Desa berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Bejjong" mendapat dukungan dalam penelitian ini dengan arah pengaruh positif.

Hasil pengujian untuk pengaruh variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (APKD) terhadap variabel Kesejahteraan Masyarakat (KS) menghasilkan nilai koefisien (*standardized coefficient*) positif sebesar 0,481 dan *sig. value* sebesar $(0,000) < sig. tolerance$ (0,05), maka H2 diterima. Artinya, pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan desa terhadap kesejahteraan terbukti signifikan. Dengan demikian H2 yang diajukan yaitu "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Bejjong" mendapat dukungan dalam penelitian ini dengan arah pengaruh positif.

Hasil pengujian untuk pengaruh variabel Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa (TPKD) terhadap Kesejahteraan Masyarakat (KS) menghasilkan nilai koefisien (*standardized coefficient*) negatif sebesar -0,141 dan *sig. value* sebesar $(0,021) < sig. tolerance$ (0,05), maka H3 ditolak. Artinya, pengaruh transparansi pengelolaan keuangan desa terhadap kesejahteraan terbukti signifikan. Dengan demikian H3 yang diajukan yaitu "Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Bejjong." mendapat dukungan dalam penelitian ini dengan arah pengaruh negatif.

Pembahasan

Pengaruh Penggunaan Alokasi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Bejjong

Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa memiliki pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Bejjong. Hal tersebut dikarenakan penggunaan Alokasi Dana Desa untuk keperluan operasional dan pemberdayaan masyarakat telah memenuhi target yang diinginkan oleh masyarakat maupun pemerintah desa. Masyarakat desa berpendapat bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa penunjang kesehatan di Desa Bejjong terutama untuk kegiatan posyandu dirasa sangat baik. Pada kegiatan PKK yang diselenggarakan juga mendapat tanggapan positif dari masyarakat, kegiatan PKK sering diadakan setiap minggunya dan memiliki banyak sekali anggota. Masyarakat merasakan bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa pada desa dirasa sangat tepat karena masyarakat dampak dari penggunaan Alokasi Dana Desa untuk kemajuan kesehatan balita dan pemberdayaan masyarakat sangat maju.

Tanggapan masyarakat menjelaskan bahwa pemerintah desa telah mampu menggunakan dana Alokasi Dana Desa dengan baik dan merasa puas akan kinerja pemerintah desa dalam memfasilitasi kegiatan masyarakat. Rasa puas masyarakat akan kinerja pemerintah desa merupakan tujuan pemerintah desa dalam menjalankan tugas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori *Stewardship* bahwa pemerintah tidak termotivasi atau mengesampingkan kepentingan pribadi untuk mencapai tujuan bersama yaitu kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja masyarakat maka kesejahteraan masyarakat akan semakin tinggi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Atmojo *et al.* (2017), Bempah (2013), Ruru *et al.* (2017) dan Arista *et al.* (2016) yang mengungkapkan bahwa Alokasi Dana Desa sangat efektif untuk mendukung pemberdayaan masyarakat desa dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Bejjong

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, diperoleh kesimpulan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Bejjong. Hal tersebut dari data responden yang didapatkan bahwa setelah melihat laporan keuangan yang diberikan, masyarakat beranggapan bahwa laporan keuangan yang telah disajikan telah sesuai, namun masyarakat bernaggapan bahwa pengawasan dari tim pelaksana kegiatan masih kurang, hal tersebut dibuktikan dengan respon masyarakat yang masih ragu-ragu ataupun tidak setuju dengan pengawasan terhadap penggunaan keuangan desa. Selebihnya untuk penyajian pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa telah sesuai.

Dalam laporan keuangan yang disajikan telah dijelaskan setiap aliran dana yang masuk dan keluar, terdapat juga rincian penggunaan dana yang telah dikeluarkan untuk berbagai kegiatan operasional desa maupun kegiatan penyelenggaraan desa. Dalam APBDesa juga dirincikan seluruh pendapatan desa baik yang bersumber dari luar desa maupun dalam desa, belanja dan pembiayaan yang ada.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Komang *et al.* (2017), Muslimin *et al.* (2012), Wardana (2016) yang menyimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dengan baik dan akuntabel mampu memberikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa.

Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Kesejahteraan masyarakat Desa Bejjong.

Berdasarkan pengujian hipotesis dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa transparansi pengelolaan keuangan desa berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Bejjong. Hal tersebut dikarenakan menurut jawaban responden bahwa dalam transparansi yang ada dalam pengelolaan keuangan di Desa Bejjong masih kurang. Masyarakat menjelaskan bahwa keberadaan musyawarah dalam pembangunan desa memang ada dan diadakan dengan mengundang aparatur desa dan anggota permusyawaratan desa. Namun masyarakat juga berpendapat bahwa belum ada akses terhadap informasi penggunaan keuangan desa, sedangkan keterbukaan penggunaan keuangan desa juga tidak ditemukan dalam media informasi. Hal tersebut menyebabkan masyarakat merasa bahwa transparansi pengelolaan keuangan desa masih kurang dan perlu diperbaiki.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widyatama *et al.* (2017), Syamsi (2014), Sangki *et al.* (2017) dan Wida (2016) yang dalam penelitiannya menemukan bahwa kurangnya akses terhadap informasi penggunaan dana dan belum sempurnanya musyawarah dengan masyarakat membuat masyarakat tidak mampu mengetahui perkembangan penggunaan keuangan desa.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa Penggunaan Alokasi Dana Desa (PADD) berpengaruh positif signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat (KS) Desa Bejjong. Hal ini menunjukkan bahwa Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Bejjong telah mampu meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, ini ditunjukkan bahwa penyaluran dana Alokasi Dana Desa untuk kegiatan PKK dan Posyandu mendapatkan respon yang baik dari masyarakat Desa Bejjong serta pelayanan operasional pemerintahan desa yang baik.

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (APKD) berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat (KS) Desa Bejjong. Hal ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (APKD) di Desa Bejjong dikatakan baik secara teknik maupun administratif. Pengelolaan seluruh keuangan desa mampu dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan secara rinci dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta pertanggungjawaban.

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa (TPKD) berpengaruh signifikan negatif terhadap Kesejahteraan Masyarakat (KS) Desa Bejjong. Hal ini menunjukkan bahwa Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa (TPKD) di Desa Bejjong belum mampu memberikan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dan keterbukaan pemerintahan desa dalam memberikan informasi pengelolaan keuangan desa. Transparansi pemerintahan Desa Bejjong juga belum mampu memberikan informasi pengelolaan keuangan desa dalam media masyarakat, meskipun dalam praktiknya sudah diadakan musyawarah.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan yang ada, peneliti memberikan saran atau rekomendasi untuk menyempurnakan penelitian ini dan menjadi bahan pertimbangan penelitian selanjutnya, sebagai berikut:

Bagi pemerintah Desa Bejjong, hendaknya pemerintah Desa Bejjong lebih transparan dalam mengelola keuangan desa sehingga masyarakat akan semakin percaya terhadap kinerja pemerintah desa. Pemerintah desa hendaknya menyediakan media informasi bagi masyarakat dan menambah massa dalam Musrenbag agar sebagian warga mengetahui penggunaan dana untuk berbagai kegiatan desa.

Bagi Masyarakat, hendaknya masyarakat lebih berpartisipasi dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa. Masyarakat juga dapat memberikan saran maupun masukan kepada pemerintah desa dalam pelaksanaan kegiatannya. Sehingga masyarakat dapat mengetahui perkembangan kegiatan ataupun penyelenggaraan desa yang didanai desa serta kinerja pemerintah desa dalam pelaksanaannya.

Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya menambahkan variabel selain penggunaa Alokasi Dana Desa, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa dalam penelitian selanjutnya sehingga mampu memberikan temuan empiris baru. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya menggunakan indikator lain dalam penelitiannya sesuai dengan yang diperlukan serta mampu berinovasi dengan kuisisioner yang sesuai dengan kondisi penelitian, sehingga mampu memberikan jawaban yang lebih valid dan lebih rinci.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. dan B. Jatmiko. 2014. Kontribusi Dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Mewujudkan Anggaranpendapatan Dan Belanja Desa Yang Transparan Dan Akuntabel (Survey Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Ngaglik, Sleman, Yogyakarta). *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta.
- Arista, M., T. Erviantono dan W. Supriyanti. 2016. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung). *Skripsi*. Universitas Udayana. Bandung.
- Atmojo, M. E., H. D. Fridayani, A. N. Kasiwi dan M. A. Pratama. 2017. Efektivitas Dana Desa Untuk Pengembangan Potensi Ekonomi Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Desa Bangunjiwo. *Jurnal Sosial Politik Humaniora* 14(1).
- Bempah, R. 2013. Analisis Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Penduduk Miskin Di Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso. *E-Jurnal Katalogis*, 1(2): 55-66 ISSN: 2302-2019.
- Dura, J. 2016. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Jibeka* 10(1): 26 - 32.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23*. Cetakan VIII. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Komang, A., A. Tingga, dan M. Pradana. 2014. Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali (Sebuah Studi Interpretif Pada Organisasi Publik Non Pemerintahan). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1* 2(1).
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit ANDI. Yogyakarta.

- Muslimin, Mappamiring dan Nurmaeta. 2012. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. *Otoritas Jurnal Ilmu Pemerintahan* 2(1).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- ____ Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2093. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4587. Jakarta
- Ruru, N., L. Kalangi, dan N. S. Budiarmo. 2017. Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12(1): 83-90.
- Sangki, A., R. Gosal, dan J. Kairupan. 2017. Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). *Skripsi*. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Sugista, R. 2017. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan Desa. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Syamsi, S. 2014. Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa. *Jisip: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 3(1) ISSN 2442-6962.
- Umami, R., Idang dan Nurodin. 2017. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmia Ilmu Ekonomi* 6(11) ISSN: 20886969.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495. Jakarta.
- ____ Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4967. Jakarta.
- ____ Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437. Jakarta.
- Wardana, I. 2016. Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Semarang.
- Wida, S. 2016. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa - Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. *Skripsi*. Program Studi Strata 1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Jember.
- Widyatama, A., L. Novita, dan Diarespati. 2017. Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 02(02): 1-20.